

PENGEMBANGAN KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN

Oleh:
Asep Herry Hernawan (FIP UPI)

A. Pendahuluan

Terbitnya UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang disertai dengan munculnya kebijakan-kebijakan lainnya seperti PP Nomor 19/2005, Permendiknas Nomor 22, 23, dan 24 Tahun 2006 saat ini membawa pemikiran baru dalam pengelolaan sistem pendidikan di Indonesia yang mengarah pada berkembangnya keinginan untuk melaksanakan otonomi pengelolaan pendidikan. Otonomi pengelolaan pendidikan ini diharapkan akan mendorong terciptanya peningkatan pelayanan pendidikan kepada masyarakat yang bermuara pada upaya peningkatan kualitas pengelolaan pendidikan pada tataran paling bawah (*at the bottom*) yaitu sekolah atau satuan pendidikan. Penerapan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) dewasa ini sebagai bukti bahwa sekolah diharapkan menjadi *centre of excellence* dari inovasi implementasi kebijakan pendidikan saat ini yang bukan hanya harus dikaji sebagai wacana dalam pengelolaan pendidikan namun sebaiknya dipertimbangkan sebagai langkah strategis ke arah peningkatan mutu pendidikan.

Pemberdayaan sekolah dengan memberikan otonomi yang lebih besar dalam pengembangan kurikulum, di samping menunjukkan sikap tanggap pemerintah terhadap tuntutan masyarakat juga dapat ditujukan sebagai sarana peningkatan efisiensi, mutu, dan pemerataan pendidikan. Adanya otonomi dalam pengembangan kurikulum ini merupakan potensi bagi sekolah untuk meningkatkan kinerja para pengelola sekolah termasuk guru dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pendidikan. Selain itu, otonomi dalam pengembangan kurikulum memberikan keleluasaan kepada sekolah dalam mengelola sumber daya dan menyertakan masyarakat untuk berpartisipasi, serta mendorong profesionalisme para pengawas, kepala sekolah, dan guru. Dalam pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan ini, kepala sekolah dan guru memiliki kesempatan yang sangat luas dan terbuka untuk melakukan inovasi pengembangan kurikulum, misalnya dengan cara melakukan eksperimen-eksperimen di lingkungan di mana sekolah itu berada. Kepala sekolah dan guru menjadi perancang kurikulum (*curriculum designer*) bagi sekolahnya berdasarkan standar isi dan standar kompetensi lulusan sekaligus melaksanakan, membina, dan mengembangkannya. Melaksanakan kurikulum yaitu mentransformasikan isi kurikulum yang tertuang dalam silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran kepada siswa dalam proses pembelajaran. Membina kurikulum yaitu mengupayakan kesesuaian kurikulum aktual dengan kurikulum potensial sehingga tidak terjadi kesenjangan. Mengembangkan kurikulum yaitu upaya meningkatkan dalam bentuk nilai tambah dari apa yang telah dilaksanakan sesuai dengan kurikulum potensial.

Kepala sekolah dan guru berkesempatan juga melakukan penilaian langsung terhadap berhasil tidaknya kurikulum tersebut. Dengan melakukan penilaian dapat diketahui kekurangan dalam pelaksanaan dan pembinaan kurikulum yang sedapat mungkin diatasi, dicarikan upaya lain yang lebih baik, sehingga diperoleh hasil yang lebih optimal. Dalam hal inilah, peranan pengawas sekolah (supervisor) sangat

dibutuhkan untuk membina kepala sekolah dan guru dalam merancang, melaksanakan, membina, mengembangkan, sampai mengevaluasi kurikulum pada tingkat satuan pendidikan tersebut.

B. Kebijakan Pengembangan Kurikulum di Indonesia

Kecenderungan yang nampak dari pelaksanaan kurikulum pada waktu yang lalu yaitu adanya penekanan makna mutu pendidikan yang lebih banyak dikaitkan dengan aspek kemampuan akademik, khususnya pada aspek kognitif. Hal tersebut berdampak pada terabaikannya aspek akhlak, budi pekerti, seni, dan kecakapan yang diperlukan oleh siswa untuk menghadapi kehidupannya. Indikator-indikator yang mendukung kecenderungan tersebut, berdasarkan hasil evaluasi Ditjen Dikdasmen Depdiknas, di antaranya:

- a. Beban belajar siswa terlalu berat yang disebabkan oleh banyaknya mata pelajaran dan materi/substansi setiap mata pelajaran.
- b. Materi pelajaran dianggap terlalu sukar karena kurang relevan dengan tingkat perkembangan berpikir siswa, dan kurang bermakna karena kurang terkait dengan aplikasi kehidupan sehari-hari.
- c. Terjadinya deviasi misi mata pelajaran tertentu dengan kegiatan belajar mengajar, seperti mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesehatan, Kerajinan Tangan dan Kesenian yang lebih menekankan proses pembelajaran teoretis.
- d. Bersifat sangat populis yang memberlakukan satu sistem kurikulum untuk semua siswa di seluruh tanah air yang sebenarnya memiliki potensi, aspirasi, dan kondisi lingkungan yang berbeda.
- e. Kurang memberikan kemerdekaan pada guru dan tenaga kependidikan lainnya untuk melakukan improvisasi dan justifikasi sesuai kondisi lapangan.

Pada saat yang sama diperlukan penyesuaian-penyesuaian untuk menjawab persoalan pengurangan beban kurikulum dan penyeimbangan antara kognisi dan emosi, pengembangan kecakapan hidup (*lifeskills*), pendidikan nilai, keterkaitan dengan dunia kerja, pendidikan multikultur, multi bahasa, pendidikan berkelanjutan, pengembangan kepekaan estetika, proses belajar sepanjang hayat, profil kemampuan lulusan, globalisasi, perkembangan teknologi informasi, dan pengembangan konsep sekolah sebagai pusat budaya (*centre of culture*). Semua hal tersebut sangat mendukung perlunya penyesuaian dan perubahan kurikulum yang signifikan bagi masa depan anak bangsa.

Dilihat dari pengalaman-pengalaman dalam pelaksanaan kurikulum sekolah, terutama kurikulum tahun 1968, 1975, 1984, beserta struktur kurikulum yang dikembangkannya, pendekatan pengembangan kurikulum di Indonesia lebih bersifat sentralistik, artinya kebijakan pengembangan kurikulum dilakukan pada tingkat pusat (Kurikulum Nasional). Pada kurikulum tahun 1994 sesuai dengan munculnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional beserta peraturan pemerintah yang menyertainya, kebijakan pengembangan kurikulum terbagi menjadi dua bagian yang sering dikenal dengan kurikulum nasional dan kurikulum muatan lokal. Kurikulum nasional adalah kurikulum yang isi dan bahan pelajarannya ditetapkan secara nasional dan wajib dipelajari oleh semua siswa sekolah dasar di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di sekolah Indonesia yang berada di luar negeri. Kurikulum muatan lokal ialah kurikulum yang isi dan bahan kajiannya ditetapkan dan

disesuaikan dengan keadaan lingkungan alam, sosial, ekonomi, budaya serta kebutuhan pembangunan daerah.

Terbitnya Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 memunculkan kebijakan baru dalam pengembangan kurikulum di tanah air. Pada pasal 38 ayat 1 UU tersebut dinyatakan bahwa "Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar dan menengah ditetapkan oleh pemerintah". Dinyatakan pula pada ayat 2 bahwa "Kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota untuk pendidikan dasar dan provinsi untuk pendidikan menengah".

Kebijakan pengembangan kurikulum sudah diwarnai oleh semangat otonomi daerah, dimana sekalipun kurikulum itu ditujukan untuk mencapai tujuan nasional, tetapi cara pencapaiannya disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan daerah. Pelaksanaan kurikulum menerapkan prinsip "Kesatuan dalam Kebijakan dan Keberagaman dalam Pelaksanaan". Standar nasional disusun pusat dan cara pelaksanaannya disesuaikan masing-masing daerah/sekolah. Perwujudan "Kesatuan dalam Kebijakan" tertuang dalam pengembangan Kerangka Dasar, Standar Kompetensi Bahan Kajian, dan Standar Kompetensi Mata Pelajaran, beserta Pedoman Pelaksanaannya. Perwujudan "Keberagaman dalam Pelaksanaan" tertuang dalam pengembangan silabus dan skenario pembelajaran. Pendekatan yang digunakan saat itu yaitu pendekatan kurikulum berbasis kompetensi (*competency-based curriculum*). Pendekatan ini menjadi pilihan dalam untuk menghadapi berbagai persoalan dengan harapan:

- a. Adanya peningkatan mutu pendidikan secara nasional
- b. Dilakukan secara responsif terhadap penerapan hak-hak azasi manusia, kehidupan demokratis, globalisasi, dan otonomi daerah
- c. Agar pendidikan nasional memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif sesuai dengan standar mutu nasional dan internasional.
- d. Agar pendidikan nasional dapat merespon secara proaktif berbagai perkembangan informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta tuntutan desentralisasi.
- e. Lembaga pendidikan tidak akan kehilangan relevansi program pembelajaran terhadap kepentingan daerah dan karakteristik siswa serta tetap memiliki fleksibilitas dalam melaksanakan kurikulum yang berdiversifikasi.

Sebagai kelanjutan dari terbitnya UU Nomor 20/2003, telah terbit juga Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang di dalamnya memuat ketentuan mengenai delapan standar, yaitu: (1) Standar Isi, (2) Standar Proses, (3) Standar Kompetensi Lulusan, (4) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, (5) Standar Sarana dan Prasarana, (6) Standar Pengelolaan, (7) Standar Pembiayaan, dan (8) Standar Penilaian Pendidikan.

Penetapan standar-standar di atas bertujuan untuk menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka pencerdasan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Standar tersebut juga memiliki fungsi sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan untuk mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Untuk mengembangkan, memantau pelaksanaan, dan mengevaluasi pencapaian standar tersebut telah dibentuk Badan Standar Nasional

Pendidikan (BSNP) yang merupakan badan mandiri/independen yang secara struktural bertanggung jawab kepada Mendiknas.

Dalam PP tersebut dinyatakan bahwa setiap sekolah/madrasah dapat mengembangkan kurikulum berdasarkan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan Standar Isi (SI) dan berpedoman kepada panduan yang ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Sekolah yang telah melakukan uji coba kurikulum 2004 secara menyeluruh dapat secara mandiri mengembangkan kurikulumnya berdasarkan SKL, SI dan Panduan Umum mulai tahun ajaran 2006/2007.

C. Hakekat kurikulum

Istilah kurikulum (*curriculum*), yang pada awalnya digunakan dalam dunia olahraga, berasal dari kata *curir* (pelari) dan *curere* (tempat berpacu). Pada saat itu kurikulum diartikan sebagai jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari mulai dari *start* sampai *finish* untuk memperoleh medali/penghargaan. Kemudian, pengertian tersebut diterapkan dalam dunia pendidikan menjadi sejumlah mata pelajaran (*subject*) yang harus ditempuh oleh seorang siswa dari awal sampai akhir program pelajaran untuk memperoleh penghargaan dalam bentuk ijazah. Dari pengertian tersebut, dalam kurikulum terkandung dua hal pokok, yaitu (1) adanya mata pelajaran yang harus ditempuh oleh siswa, dan (2) tujuan utamanya yaitu untuk memperoleh ijazah. Dengan demikian, implikasi terhadap praktik pengajaran yaitu setiap siswa harus menguasai seluruh mata pelajaran yang diberikan dan menempatkan guru dalam posisi yang sangat penting dan menentukan. Keberhasilan siswa ditentukan oleh seberapa jauh mata pelajaran tersebut dikuasainya dan biasanya disimbolkan dengan skor yang diperoleh setelah mengikuti suatu tes atau ujian.

Pengertian kurikulum seperti disebutkan di atas dianggap pengertian yang sempit atau sangat sederhana. Jika kita mempelajari buku-buku atau literatur lainnya tentang kurikulum, terutama yang berkembang di negara-negara maju, maka akan ditemukan banyak pengertian yang lebih luas dan beragam. Kurikulum itu tidak terbatas hanya pada sejumlah mata pelajaran saja, tetapi mencakup semua pengalaman belajar (*learning experiences*) yang dialami siswa dan mempengaruhi perkembangan pribadinya. Bahkan Harold B. Albery (1965) memandang kurikulum sebagai semua kegiatan yang diberikan kepada siswa di bawah tanggung jawab sekolah (*all of the activities that are provided for the students by the school*). Kurikulum tidak dibatasi pada kegiatan di dalam kelas saja, tetapi mencakup juga kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh siswa di luar kelas. Pendapat yang senada dan menguatkan pengertian tersebut dikemukakan oleh Saylor, Alexander, dan Lewis (1974) yang menganggap kurikulum sebagai segala upaya sekolah untuk mempengaruhi siswa supaya belajar, baik dalam ruangan kelas, di halaman sekolah, maupun di luar sekolah.

Pengertian kurikulum senantiasa berkembang terus sejalan dengan perkembangan teori dan praktik pendidikan. Dengan beragamnya pendapat mengenai pengertian kurikulum, maka secara teoretis kita agak sulit menentukan satu pengertian yang dapat merangkum semua pendapat. Pada saat sekarang istilah kurikulum memiliki empat dimensi pengertian, di mana satu dimensi dengan dimensi lainnya saling berhubungan. Keempat dimensi kurikulum tersebut yaitu: (1) Kurikulum sebagai suatu ide/gagasan, (2) Kurikulum sebagai suatu rencana tertulis yang sebenarnya merupakan perwujudan dari kurikulum sebagai suatu ide, (3) Kurikulum sebagai suatu kegiatan yang sering pula disebut dengan istilah kurikulum sebagai

suatu realita atau implementasi kurikulum. Secara teoretis dimensi kurikulum ini adalah pelaksanaan dari kurikulum sebagai suatu rencana tertulis. (4) Kurikulum sebagai suatu hasil yang merupakan konsekuensi dari kurikulum sebagai suatu kegiatan.

Pandangan atau anggapan yang sampai saat ini masih lazim dipakai dalam dunia pendidikan dan persekolahan di negara kita, yaitu kurikulum sebagai suatu rencana tertulis yang disusun guna memperlancar proses pembelajaran. Hal ini sesuai dengan rumusan pengertian kurikulum seperti yang tertera dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional : "Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu". Dalam panduan penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah yang dikeluarkan oleh BSNP, pengertian kurikulum yang digunakan mengacu pada pengertian seperti yang tertera dalam UU tersebut. Secara lebih jelas dikatakan bahwa KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. KTSP terdiri dari tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan silabus.

D. Fungsi dan Peranan Kurikulum

Apa sebenarnya fungsi kurikulum bagi guru, siswa, kepala sekolah/ pengawas, orang tua, dan masyarakat?. Pada dasarnya kurikulum itu berfungsi sebagai pedoman atau acuan. Bagi guru, kurikulum itu berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran. Bagi kepala sekolah dan pengawas, kurikulum itu berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan supervisi atau pengawasan. Bagi orang tua, kurikulum itu berfungsi sebagai pedoman dalam membimbing anaknya belajar di rumah. Bagi masyarakat, kurikulum itu berfungsi sebagai pedoman untuk memberikan bantuan bagi terselenggaranya proses pendidikan di sekolah. Bagi siswa sebagai subjek didik, terdapat enam fungsi kurikulum sebagai berikut:

- a. Fungsi Penyesuaian (*the adjustive or adaptive function*)
- b. Fungsi Integrasi (*the integrating function*)
- c. Fungsi Diferensiasi (*the differentiating function*)
- d. Fungsi Persiapan (*the propaedeutic function*)
- e. Fungsi Pemilihan (*the selective function*)
- f. Fungsi Diagnostik (*the diagnostic function*)

Fungsi penyesuaian mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu mengarahkan siswa agar memiliki sifat *well adjusted* yaitu mampu menyesuaikan dirinya dengan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Lingkungan itu sendiri senantiasa mengalami perubahan dan bersifat dinamis. Oleh karena itu, siswa pun harus memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di lingkungannya. **Fungsi integrasi** mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu menghasilkan pribadi-pribadi yang utuh. Siswa pada dasarnya merupakan anggota dan bagian integral dari masyarakat. Oleh karena itu, siswa harus memiliki kepribadian yang dibutuhkan untuk dapat hidup dan berintegrasi dengan masyarakatnya.

Fungsi diferensiasi mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan pelayanan terhadap perbedaan individu siswa.

Setiap siswa memiliki perbedaan, baik dari aspek fisik maupun psikis, yang harus dihargai dan dilayani dengan baik. **Fungsi persiapan** mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu mempersiapkan siswa untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan berikutnya. Selain itu, kurikulum juga diharapkan dapat mempersiapkan siswa untuk dapat hidup dalam masyarakat seandainya karena sesuatu hal, tidak dapat melanjutkan pendidikannya.

Fungsi pemilihan mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih program-program belajar yang sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Fungsi pemilihan ini sangat erat hubungannya dengan fungsi diferensiasi, karena pengakuan atas adanya perbedaan individual siswa berarti pula diberinya kesempatan bagi siswa tersebut untuk memilih apa yang sesuai dengan minat dan kemampuannya. Untuk mewujudkan kedua fungsi tersebut, kurikulum perlu disusun secara lebih luas dan bersifat fleksibel. **Fungsi diagnostik** mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu membantu dan mengarahkan siswa untuk dapat memahami dan menerima kekuatan (potensi) dan kelemahan yang dimilikinya. Apabila siswa sudah mampu memahami kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan yang ada pada dirinya, maka diharapkan siswa dapat mengembangkan sendiri potensi kekuatan yang dimilikinya atau memperbaiki kelemahan-kelemahannya.

Kurikulum dalam pendidikan formal di sekolah/madrasah memiliki peranan yang sangat strategis dan menentukan pencapaian tujuan pendidikan. Terdapat tiga peranan yang dinilai sangat penting, yaitu peranan konservatif, peranan kreatif, dan peranan kritis/evaluatif (Oemar Hamalik, 1990).

- a. **Peranan Konservatif.** Peranan ini menekankan bahwa kurikulum itu dapat dijadikan sebagai sarana untuk mentransmisikan nilai-nilai warisan budaya masa lalu yang dianggap masih relevan dengan masa kini kepada generasi muda, dalam hal ini para siswa. Dengan demikian, peranan konservatif ini pada hakikatnya menempatkan kurikulum, yang berorientasi ke masa lampau. Peranan ini sifatnya menjadi sangat mendasar, disesuaikan dengan kenyataan bahwa pendidikan pada hakikatnya merupakan proses sosial. Salah satu tugas pendidikan yaitu mempengaruhi dan membina perilaku siswa sesuai dengan nilai-nilai sosial yang hidup di lingkungan masyarakatnya.
- b. **Peranan Kreatif.** Peranan ini menekankan bahwa kurikulum harus mampu mengembangkan sesuatu yang baru sesuai dengan perkembangan yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat pada masa sekarang dan masa mendatang. Kurikulum harus mengandung hal-hal yang dapat membantu setiap siswa mengembangkan semua potensi yang ada pada dirinya untuk memperoleh pengetahuan-pengetahuan baru, kemampuan-kemampuan baru, serta cara berpikir baru yang dibutuhkan dalam kehidupannya.
- c. **Peranan Kritis dan Evaluatif.** Peranan ini dilatarbelakangi oleh adanya kenyataan bahwa nilai-nilai dan budaya yang hidup dalam masyarakat senantiasa mengalami perubahan, sehingga pewarisan nilai-nilai dan budaya masa lalu kepada siswa perlu disesuaikan dengan kondisi yang terjadi pada masa sekarang. Selain itu, perkembangan yang terjadi pada masa sekarang dan masa mendatang belum tentu sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Oleh karena itu, peranan kurikulum tidak hanya mewariskan nilai dan budaya yang ada atau menerapkan hasil

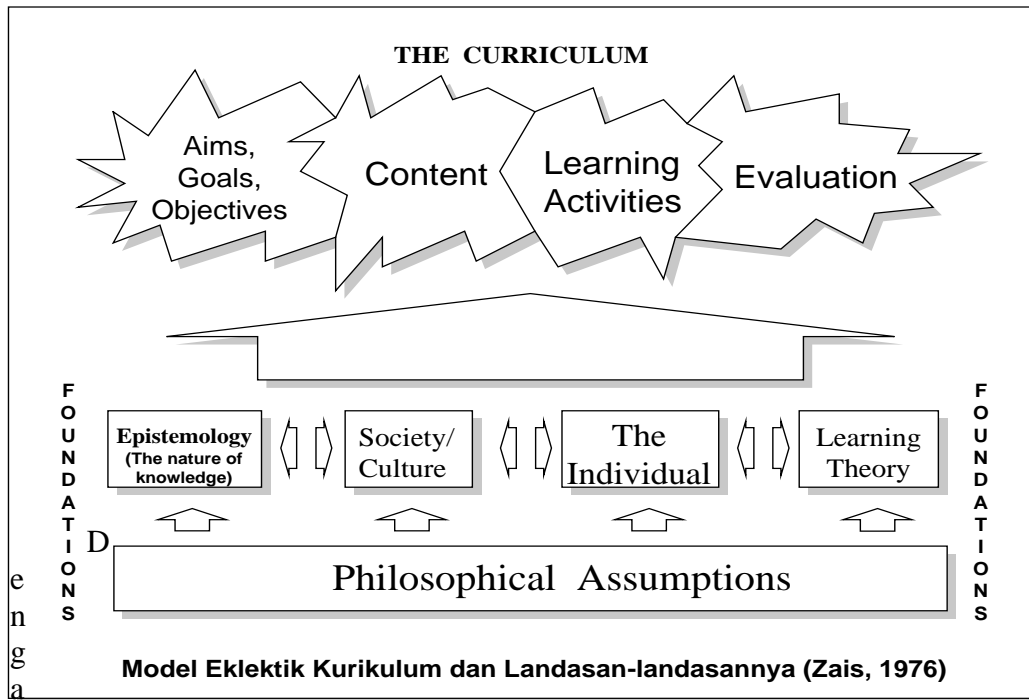
perkembangan baru yang terjadi, melainkan juga memiliki peranan untuk menilai dan memilih nilai dan budaya serta pengetahuan baru yang akan diwariskan tersebut. Dalam hal ini, kurikulum harus turut aktif berpartisipasi dalam kontrol atau filter sosial. Nilai-nilai sosial yang tidak sesuai lagi dengan keadaan dan tuntutan masa kini dihilangkan dan diadakan modifikasi atau penyempurnaan-penyempurnaan.

Ketiga peranan kurikulum di atas tentu saja harus berjalan secara seimbang dan harmonis agar dapat memenuhi tuntutan keadaan. Jika tidak, akan terjadi ketimpangan-ketimpangan yang menyebabkan peranan kurikulum persekolahan menjadi tidak optimal. Menyelaraskan ketiga peranan kurikulum tersebut menjadi tanggung jawab semua pihak yang terkait dalam proses pendidikan, di antaranya guru, kepala sekolah, pengawas, orang tua, siswa, dan masyarakat. Dengan demikian, pihak-pihak yang terkait tersebut idealnya dapat memahami betul apa yang menjadi tujuan dan isi dari kurikulum yang diterapkan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

E. Landasan Pengembangan Kurikulum

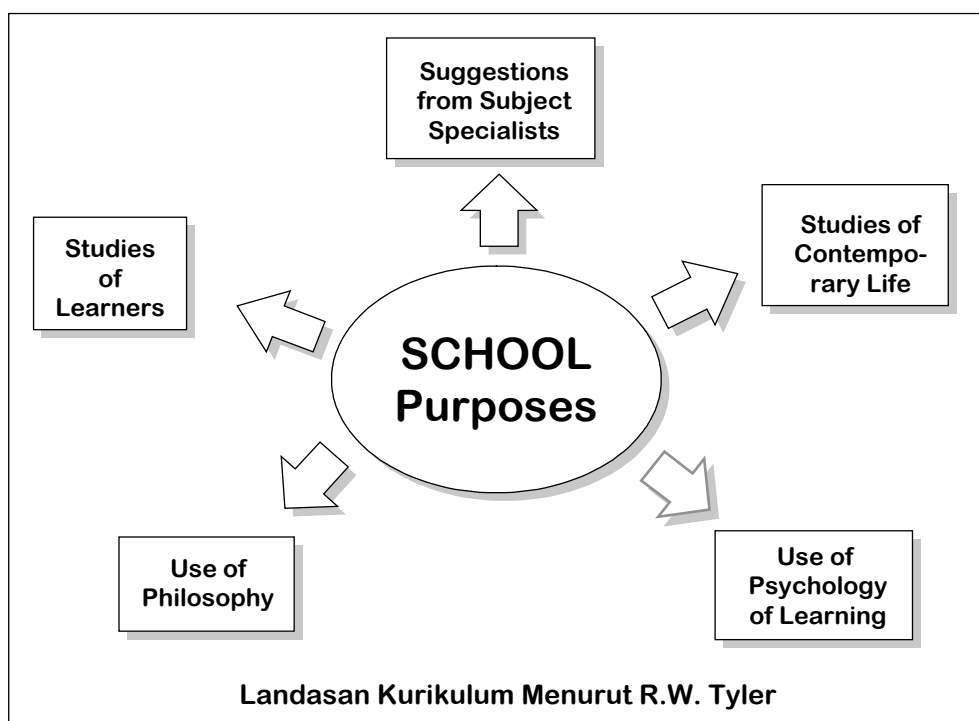
Dalam setiap kegiatan pengembangan kurikulum, baik pada level makro maupun mikro, selalu membutuhkan landasan-landasan yang kuat dan didasarkan atas hasil-hasil pemikiran dan penelitian yang mendalam. Hal ini disebabkan bahwa kurikulum itu sendiri pada hakekatnya merupakan rancangan atau program pendidikan. Sebagai suatu rancangan/program tersebut, maka kurikulum ini menempati posisi/kedudukan yang sangat strategis dalam keseluruhan kegiatan pendidikan, dalam arti akan sangat menjadi penentu terhadap proses pelaksanaan dan hasil-hasil yang ingin dicapai oleh pendidikan. Dengan posisi yang penting itu, maka penyusunan dan pengembangan kurikulum tidak bisa dilakukan secara sembarangan, dibutuhkan berbagai landasan/dasar yang kokoh dan kuat. Landasan-landasan tersebut pada hakekatnya adalah faktor-faktor yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan oleh para pengembang kurikulum pada waktu mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Sebuah bangunan/gedung yang besar tentu membutuhkan landasan atau fondasi yang kuat agar bangunan tersebut dapat berdiri tegak, kokoh dan tahan lama. Apabila bangunan tersebut tidak memiliki fondasi yang kokoh, maka yang cepat ambruk/hancur adalah gedung itu sendiri, tetapi apabila landasan pendidikan/kurikulum yang lemah, tidak kokoh, maka yang dipertaruhkan adalah manusianya (siswa).

Berkaitan dengan landasan-landasan pengembangan kurikulum ini, Robert S. Zais (1976) mengemukakan empat landasan, yaitu : *philosophy and the nature of knowledge, society and culture, the individual, dan learning theory*. Dengan berpedoman pada empat landasan tersebut dibuatlah model yang disebut "*An eclectic model of the curriculum and its foundations*" sebagai berikut :



memperhatikan bagan di atas, suatu kurikulum dengan berbagai komponennya yang terdiri atas tujuan (*aims, goals, objectives*), isi/bahan (*content*), aktivitas belajar (*learning activities*), dan evaluasi, agar memiliki tingkat relevansi dan fleksibilitas yang tinggi/memadai perlu ditopang oleh berbagai landasan (*foundations*). Landasan-landasan tersebut yaitu : landasan filosofis sebagai landasan utama, epistemologi (sifat-sifat pengetahuan), masyarakat dan kebudayaan, individu (siswa), dan teori-teori belajar.

Senada dengan pendapat Zais di atas, Ralph W. Tyler (dalam Ornstein, 1988) mengemukakan pandangan yang erat kaitannya dengan beberapa aspek yang melandasi suatu kurikulum (dalam hal ini disebut *school purposes*) melalui visualisasi sebagai berikut :



Selain pandangan dari kedua pakar kurikulum tersebut di atas, berdasarkan hasil studi dari beberapa sumber, secara umum terdapat empat aspek pokok yang mendasari pengembangan kurikulum tersebut, yaitu landasan filosofis, psikologis, sosial-budaya, dan perkembangan ilmu pengetahuan/teknologi. Landasan filosofis dimaksudkan pentingnya filsafat dalam membina dan mengembangkan kurikulum pada suatu lembaga pendidikan. Filsafat ini menjadi landasan utama yang melandasi aspek-aspek lainnya. Perumusan tujuan dan isi kurikulum pada dasarnya bergantung pada pertimbangan-pertimbangan filosofis. Pandangan filosofis yang berbeda akan mempengaruhi dan mendorong aplikasi pengembangan kurikulum yang berbeda pula. Berdasarkan landasan filosofis ini ditentukan tujuan pendidikan nasional, tujuan institusional, tujuan mata pelajaran, dan tujuan pembelajaran. Landasan psikologis terutama berkaitan dengan psikologi/teori belajar dan psikologi perkembangan. Psikologi perkembangan diperlukan terutama dalam menentukan isi kurikulum yang diberikan kepada siswa agar tingkat keluasaan dan kedalamannya sesuai dengan tarap perkembangan siswa tersebut. Psikologi belajar memberikan kontribusi dalam hal bagaimana kurikulum itu disampaikan kepada siswa dan bagaimana pula siswa harus mempelajarinya, dengan kata lain berkenaan dengan penentuan strategi kurikulum.

Landasan sosial-budaya dijadikan sebagai salah satu aspek yang harus dipertimbangkan dalam pengembangan kurikulum karena pendidikan selalu mengandung nilai yang harus sesuai dengan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Di samping itu, keberhasilan suatu pendidikan dipengaruhi oleh lingkungan. Kehidupan masyarakat, dengan segala karakteristik dan kekayaan budayanya, menjadi dasar dan acuan bagi pendidikan/kurikulum. Landasan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) diperlukan dalam pengembangan kurikulum sebagai upaya menselaraskan isi kurikulum dengan perkembangan dan kemajuan yang terjadi dalam dunia IPTEK yang menyebabkan pula perkembangan dunia pendidikan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Selain landasan-landasan kurikulum pada umumnya seperti dijelaskan di atas, dalam implementasi kurikulum sekolah pada suatu negara selalu dilandasi juga oleh landasan legal berupa kebijakan-kebijakan pendidikan yang diberlakukan di negara tersebut. Penyelenggaraan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) yang saat ini diterapkan di Indonesia dilandasi oleh kebijakan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 ayat (19); Pasal 18 ayat (1), (2), (3), (4); Pasal 32 ayat (1), (2), (3); Pasal 35 ayat (2); Pasal 36 ayat (1), (2), (3), (4); Pasal 37 ayat (1), (2), (3); Pasal 38 ayat (1), (2).
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 1 ayat (5), (13), (14), (15); Pasal 5 ayat (1), (2); Pasal 6 ayat (6); Pasal 7 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8); Pasal 8 ayat (1), (2), (3); Pasal 10 ayat (1), (2), (3); Pasal 11 ayat (1), (2), (3), (4); Pasal 13 ayat (1), (2), (3), (4); Pasal 14 ayat (1), (2), (3); Pasal 16 ayat (1), (2), (3), (4), (5); Pasal 17 ayat (1), (2); Pasal 18 ayat (1), (2), (3); Pasal 20.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah. Standar isi ini mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Termasuk dalam

standar isi adalah : kerangka dasar dan struktur kurikulum, Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) setiap mata pelajaran pada setiap semester dari setiap jenis dan jenjang pendidikan dasar dan menengah.

- d. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah. Standar Kompetensi Lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan.
- e. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah Dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

F. Prinsip-prinsip Pengembangan Kurikulum

Sebenarnya tidak terhitung banyaknya prinsip yang dapat digunakan dalam pengembangan kurikulum. Kurikulum pada jenjang pendidikan manapun biasanya dikembangkan dengan menganut prinsip-prinsip tertentu, di mana prinsip yang dianut merupakan kaidah yang menjiwai kurikulum itu. Pada dasarnya guru harus bisa menerapkan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum yang telah ditentukan oleh para pengambil keputusan, namun demikian khususnya pada tataran pelaksanaan kurikulum di sekolah, bisa juga diciptakan sendiri prinsip-prinsip baru. Oleh karena itu selalu mungkin terjadi suatu kurikulum sekolah menggunakan prinsip-prinsip yang berbeda dengan yang digunakan dalam kurikulum sekolah lainnya.

Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum biasanya ditulis secara eksplisit di dalam buku atau dokumen kurikulum sekolah. Implementasi dari prinsip-prinsip pengembangan kurikulum tersebut dapat dikaji atau dipelajari dalam keseluruhan isi buku kurikulum tersebut, di dalam pelaksanaan kurikulum, dan evaluasi kurikulum. Sering terjadi implementasi prinsip-prinsip kurikulum itu sukar diidentifikasi, bahkan kadang-kadang yang nampak menonjol justru terjadinya peristiwa-peristiwa kurikuler yang menyimpang dari prinsip-prinsip yang digunakan dalam pengembangan kurikulum itu. Penyimpangan tersebut dapat diakibatkan oleh banyak hal, seperti:

- a. Pencantuman prinsip-prinsip dalam buku kurikulum itu hanya bersifat proforma, artinya hanya sekedar menaati langkah-langkah pengembangan kurikulum atau untuk menimbulkan kesan bahwa suatu kurikulum mendukung nilai-nilai luhur tertentu, terutama yang bersifat politis atau ilmiah;
- b. Prinsip-prinsip tersebut tidak dihayati oleh para pengembang kurikulum, pelaksana kurikulum dan hasil evaluasi kurikulum tidak menunjukkan adanya kandungan nilai dari prinsip-prinsip pengembangan kurikulum tersebut;
- c. Situasi dan kondisi di tempat kurikulum itu dilaksanakan telah berkembang dan tidak mungkin menerapkan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum itu.

Dalam kondisi seperti itu, suatu kurikulum dapat dikatakan tidak lagi mengemban fungsi yang sebenarnya, kurikulum itu berjalan secara semu. Memang demikianlah kenyataannya yang dialami oleh sejumlah kurikulum, apalagi bagi kurikulum yang telah lama sekali tidak direvisi.

Setiap kurikulum harus didasarkan pada prinsip yang terbaik (*excellence*) agar setiap siswa dapat mencapai yang terbaik bagi diri dan lingkungannya. Tiap siswa harus berpegangan pada standar yang sesuai dengan kemampuannya baik pada aspek

moral, etik, pengetahuan, ataupun aspek lainnya. Mengingat bahwa setiap siswa mempunyai bakat, minat dan motivasi yang berbeda, maka perbedaan itu perlu juga dipertimbangkan sehingga tidak hanya satu standar kualitas yang ditentukan untuk semuanya. Kaitannya dengan kebijakan pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) yang saat ini diberlakukan di Indonesia, secara umum didasarkan pada prinsip-prinsip pengembangan kurikulum yang tertera dalam UU No.20/2003 (pasal 36), yaitu bahwa: (1) Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, (2) Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan siswa, dan (3) Kurikulum disusun sesuai jenjang pendidikan dalam kerangka NKRI dengan memperhatikan :

- a. Peningkatan iman dan takwa
- b. Peningkatan akhlak mulia
- c. Peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat siswa
- d. Keragaman potensi daerah dan lingkungan
- e. Tuntutan pembangunan daerah dan nasional
- f. Tuntutan dunia kerja
- g. Perkembangan IPTEK dan seni
- h. Agama
- i. Dinamika perkembangan global
- j. Persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan

Secara lebih khusus, KTSP dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum sebagai berikut:

- a. Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan siswa dan lingkungannya.

Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa siswa memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut pengembangan kompetensi siswa disesuaikan dengan potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan siswa serta tuntutan lingkungan. Memiliki posisi sentral berarti kegiatan pembelajaran berpusat pada siswa.

- b. Beragam dan terpadu

Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan keragaman karakteristik siswa, kondisi daerah, jenjang dan jenis pendidikan, serta menghargai dan tidak diskriminatif terhadap perbedaan agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan jender. Kurikulum meliputi substansi komponen muatan wajib kurikulum, muatan lokal, dan pengembangan diri secara terpadu, serta disusun dalam keterkaitan dan kesinambungan yang bermakna dan tepat antarsubstansi.

- c. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni

Kurikulum dikembangkan atas dasar kesadaran bahwa ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang berkembang secara dinamis. Oleh karena itu, semangat dan isi kurikulum memberikan pengalaman belajar siswa untuk mengikuti dan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

d. Relevan dengan kebutuhan kehidupan

Pengembangan kurikulum dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, termasuk di dalamnya kehidupan kemasyarakatan, dunia usaha dan dunia kerja. Oleh karena itu, pengembangan keterampilan pribadi, keterampilan berpikir, keterampilan sosial, keterampilan akademik, dan keterampilan vokasional merupakan keniscayaan.

e. Menyeluruh dan berkesinambungan

Substansi kurikulum mencakup keseluruhan dimensi kompetensi, bidang kajian keilmuan dan mata pelajaran yang direncanakan dan disajikan secara berkesinambungan antarsemua jenjang pendidikan.

f. Belajar sepanjang hayat

Kurikulum diarahkan kepada proses pengembangan, pembudayaan, dan pemberdayaan siswa yang berlangsung sepanjang hayat. Kurikulum mencerminkan keterkaitan antara unsur-unsur pendidikan formal, nonformal, dan informal dengan memperhatikan kondisi dan tuntutan lingkungan yang selalu berkembang serta arah pengembangan manusia seutuhnya.

g. Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah.

Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan kepentingan nasional dan kepentingan daerah untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kepentingan nasional dan kepentingan daerah harus saling mengisi dan memberdayakan sejalan dengan motto Bhineka Tunggal Ika dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dalam pelaksanaannya, KTSP menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan kurikulum didasarkan pada potensi, perkembangan dan kondisi siswa untuk menguasai kompetensi yang berguna bagi dirinya. Dalam hal ini siswa harus mendapatkan pelayanan pendidikan yang bermutu, serta memperoleh kesempatan untuk mengekspresikan dirinya secara bebas, dinamis dan menyenangkan.
- b. Kurikulum dilaksanakan dengan menegakkan kelima pilar belajar, yaitu: (a) belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, (b) belajar untuk memahami dan menghayati, (c) belajar untuk mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif, (d) belajar untuk hidup bersama dan berguna bagi orang lain, dan (e) belajar untuk membangun dan menemukan jati diri, melalui proses pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan.
- c. Pelaksanaan kurikulum memungkinkan siswa mendapat pelayanan yang bersifat perbaikan, pengayaan, dan/atau percepatan sesuai dengan potensi, tahap perkembangan, dan kondisi siswa dengan tetap memperhatikan keterpaduan pengembangan pribadi siswa yang berdimensi ke-Tuhanan, keindividuan, kesosialan, dan moral.
- d. Kurikulum dilaksanakan dalam suasana hubungan siswa dan pendidik yang saling menerima dan menghargai, akrab, terbuka, dan hangat, dengan prinsip *tut wuri handayani, ing mada mangun karsa, ing ngarsa sung tulada* (di belakang

memberikan daya dan kekuatan, di tengah membangun semangat dan prakarsa, di depan memberikan contoh dan teladan).

- e. Kurikulum dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan multistrategi dan multimedia, sumber belajar dan teknologi yang memadai, dan memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar, dengan prinsip *alam takambang jadi guru* (semua yang terjadi, tergelar dan berkembang di masyarakat dan lingkungan sekitar serta lingkungan alam semesta dijadikan sumber belajar, contoh dan teladan).
- f. Kurikulum dilaksanakan dengan mendayagunakan kondisi alam, sosial dan budaya serta kekayaan daerah untuk keberhasilan pendidikan dengan muatan seluruh bahan kajian secara optimal.
- g. Kurikulum yang mencakup seluruh komponen kompetensi mata pelajaran, muatan lokal dan pengembangan diri diselenggarakan dalam keseimbangan, keterkaitan, dan kesinambungan yang cocok dan memadai antarkelas dan jenis serta jenjang pendidikan.

G. Struktur dan Muatan Kurikulum

Struktur kurikulum pada dasarnya merupakan pola dan susunan mata pelajaran yang harus ditempuh oleh siswa dalam kegiatan pembelajaran. Kedalaman muatan kurikulum pada setiap mata pelajaran pada setiap satuan pendidikan dituangkan dalam kompetensi yang harus dikuasai siswa sesuai dengan beban belajar yang tercantum dalam struktur kurikulum tersebut. Kompetensi yang dimaksud terdiri atas standar kompetensi dan kompetensi dasar yang dikembangkan berdasarkan standar kompetensi lulusan. Muatan lokal dan kegiatan pengembangan diri merupakan bagian integral dari struktur kurikulum pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Jika ditelaah dari dokumen standar isi sebagai lampiran Permendiknas No. 22/2006, struktur kurikulum tersebut dibedakan pada masing-masing tingkat satuan pendidikan (SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK).

Struktur kurikulum pada satuan pendidikan SD/MI di dalamnya meliputi substansi pembelajaran yang ditempuh dalam satu jenjang pendidikan selama enam tahun mulai kelas I sampai dengan kelas VI dan disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan dan standar kompetensi pada 8 mata pelajaran yang telah ditetapkan. Pembelajaran pada Kelas I s.d. III dilaksanakan melalui pendekatan tematik, sedangkan pada Kelas IV s.d. VI dilaksanakan melalui pendekatan mata pelajaran. Struktur kurikulum SMP/MTs meliputi substansi pembelajaran yang ditempuh dalam satu jenjang pendidikan selama tiga tahun mulai kelas VII sampai dengan kelas IX. Struktur kurikulum disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan dan standar kompetensi pada 10 mata pelajaran.

Struktur kurikulum SMA/MA meliputi substansi pembelajaran yang ditempuh dalam satu jenjang pendidikan selama tiga tahun mulai kelas X sampai dengan kelas XII. Struktur kurikulum disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan dan standar kompetensi mata pelajaran. Pengorganisasian kelas-kelas pada SMA/MA dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu kelas X merupakan program umum yang diikuti oleh seluruh siswa, dan kelas XI dan XII merupakan program penjurusan yang terdiri atas empat program: (1) Program Ilmu Pengetahuan Alam, (2) Program Ilmu Pengetahuan Sosial, (3) Program Bahasa, dan (4) Program Keagamaan, khusus untuk MA. Struktur kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan

(MAK) diarahkan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan siswa untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan program kejuruannya.

Struktur kurikulum untuk pendidikan khusus dikembangkan untuk siswa berkelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial berdasarkan standar kompetensi lulusan, standar kompetensi kelompok mata pelajaran, dan standar kompetensi mata pelajaran. Siswa berkelainan tersebut dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu: (1) siswa berkelainan tanpa disertai dengan kemampuan intelektual di bawah rata-rata, dan (2) siswa berkelainan disertai dengan kemampuan intelektual di bawah rata-rata. Kurikulum pendidikan khusus dalam hal ini terdiri atas 8 sampai dengan 10 mata pelajaran.

Selain terdiri atas sejumlah mata pelajaran yang keluasan dan kedalamannya merupakan beban belajar bagi siswa pada satuan pendidikan tertentu, dalam struktur kurikulum pendidikan dasar dan menengah terdapat muatan lain, yaitu muatan lokal dan kegiatan pengembangan diri. Muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah, yang materinya tidak dapat dikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang ada. Substansi muatan lokal ditentukan oleh satuan pendidikan. Kegiatan pengembangan diri bukan merupakan mata pelajaran yang harus diajarkan oleh guru. Pengembangan diri bertujuan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat, minat, setiap siswa sesuai dengan kondisi sekolah. Kegiatan pengembangan diri difasilitasi dan/atau dibimbing oleh konselor, guru, atau tenaga kependidikan yang dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan pengembangan diri dilakukan melalui kegiatan pelayanan konseling yang berkenaan dengan masalah diri pribadi dan kehidupan sosial, belajar, dan pengembangan karier siswa. Khusus untuk sekolah menengah kejuruan pengembangan diri terutama ditujukan untuk pengembangan kreativitas dan bimbingan karier. Pengembangan diri untuk satuan pendidikan khusus menekankan pada peningkatan kecakapan hidup dan kemandirian sesuai dengan kebutuhan khusus siswa.

H. Proses Penyusunan Kurikulum

Dalam pengkajian teori pengembangan kurikulum, terdapat empat tahapan pengembangan kurikulum yang dapat ditempuh, yaitu mulai dari tahap makro, tahap institusi, tahap mata pelajaran, dan tahap program pembelajaran. Pada tahap makro, pengembangan kurikulum dikaji dalam lingkup nasional, baik untuk pendidikan sekolah maupun luar sekolah, baik secara vertikal maupun horizontal dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan nasional. Secara vertikal berkaitan dengan kontinuitas atau kesinambungan pengembangan kurikulum dalam berbagai tingkatan (hierarki) institusi pendidikan (sekolah), sedangkan secara horizontal berkaitan dengan pengembangan kurikulum pada tingkatan pendidikan yang sama/setara sekalipun jenis pendidikannya berbeda. Pada tahap institusi, kegiatan pengembangan kurikulum dilakukan di setiap lembaga pendidikan (SD/MI, SMP/MTs, SMA/MAK/ dan SMK). Aspek-aspek yang dikembangkan pada tahap ini di antaranya: visi dan misi sekolah, tujuan sekolah, mata pelajaran-mata pelajaran yang akan dipelajari sesuai dengan tujuan, dan fasilitas yang dibutuhkan termasuk media dan alat pembelajaran.

Pada tahap mata pelajaran, pengembangan kurikulum diwujudkan dalam bentuk garis-garis besar program pengajaran (GBPP) atau pola dasar kegiatan belajar-

mengajar (PDKBM) atau silabus pembelajaran untuk masing-masing mata pelajaran yang dikembangkan pada masing-masing satuan pendidikan. Dari GBPP/PDKBM/silabus pembelajaran tersebut oleh guru selanjutnya dijabarkan menjadi program yang akan dilaksanakan pada periode belajar tertentu. Dalam periode waktu tersebut diharapkan para siswa dapat menguasai satu kesatuan kompetensi baik berupa pengetahuan, sikap, maupun keterampilan tertentu. Isi program tersebut adalah apa yang ada dalam GBPP/PDKBM/silabus pembelajaran pada suatu mata pelajaran, kemudian dilakukan pengaturan-pengaturan yang melengkapinya sehingga program tersebut membentuk suatu program kerja selama satu semester lengkap dengan penentuan alokasi waktu yang dibutuhkan serta kapan dilaksanakannya. Tahap program pembelajaran merupakan tahap pengembangan kurikulum secara mikro pada level kelas, di mana tugas pengembangan menjadi tanggung jawab sepenuhnya seorang guru. Dengan berpedoman pada GBPP/PDKBM/silabus pembelajaran kemudian guru menjabarkannya dalam bentuk rencana pelaksanaan pembelajaran (dulu dikenal dengan nama satuan pelajaran) untuk satu atau beberapa kali pertemuan tatap muka di kelas.

Dalam proses pengembangan kurikulum, tentu saja banyak pihak yang turut terlibat atau berpartisipasi. Hal ini disebabkan karena begitu besar dan sangat strategisnya peranan dari kurikulum itu sendiri sebagai salah satu alat utama dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Apabila dikaji secara seksama, sebenarnya harus banyak pihak yang terlibat dalam pengembangan kurikulum itu, di antaranya saja para administrator pendidikan, ahli pendidikan, ahli kurikulum, ahli psikologi, ahli bidang ilmu pengetahuan, para guru, orangtua siswa, tokoh-tokoh masyarakat dan pihak-pihak lainnya dalam porsi kegiatan yang berbeda-beda. Dari sekian banyak pihak yang terlibat, maka yang secara terus menerus terlibat dalam kegiatan pengembangan kurikulum yaitu para administrator pendidikan, pada ahli pendidikan dan kurikulum, dan tentu saja para guru sebagai pelaksana kurikulum di sekolah.

Para administrator pendidikan biasanya terdiri atas pejabat-pejabat yang relevan di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional dari mulai tingkat pusat sampai daerah bahkan sampai tingkat kecamatan dan sekolah. Di tingkat pusat, lembaga yang secara khusus mengkaji dan menjadi dapurnya pengembangan kurikulum nasional yaitu Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas dan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Keterlibatan para administrator di tingkat pusat dalam pengembangan kurikulum yaitu menyusun dasar-dasar hukum, kerangka dasar kurikulum, serta standar kompetensi dan kompetensi dasar. Kerjasama dengan para ahli pendidikan dan ahli bidang studi dari perguruan tinggi yang relevan dilakukan untuk meminta masukan-masukan dan memantapkan kerangka dasar kurikulum tersebut. Atas dasar itu, para administrator di daerah (dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota) sampai kepala sekolah mengembangkan kurikulum sekolah yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah. Para kepala sekolah sebagai administrator pendidikan yang berada pada level paling bawah (sekolah) memiliki wewenang dalam membuat operasionalisasi pelaksanaan kurikulum di sekolah masing-masing. Para kepala sekolah sebagai administrator pendidikan inilah sebenarnya yang secara terus-menerus terlibat dalam pengembangan dan implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan.

Pengembangan kurikulum bukan saja didasarkan atas perubahan tuntutan kehidupan dalam masyarakat, tetapi juga perlu dilandasi oleh perkembangan konsep-konsep dalam ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum satuan

pendidikan membutuhkan bantuan pemikiran para ahli, baik ahli pendidikan, ahli kurikulum, ahli bidang studi/disiplin ilmu. Para ahli pendidikan dan ahli kurikulum memberikan alternatif konsep pendidikan dan model kurikulum yang dipandang paling sesuai dengan keadaan dan tuntutan masyarakat serta perkembangan ilmu dan teknologi. Pengembangan kurikulum bukan hanya sekedar memilih dan menyusun bahan pelajaran dan metode mengajar, tetapi menyangkut penentuan arah dan orientasi pendidikan, pemilihan sistem dan model kurikulum, serta berbagai perangkat dan pedoman penjabaran dan implementasi dari model-model tersebut. Keterlibatan para ahli pendidikan dan kurikulum terutama sangat dibutuhkan dalam pengembangan kurikulum baik pada tingkat pusat maupun daerah. Apalagi dengan adanya kebijakan otonomi daerah yang menuntut adanya otonomi pendidikan dan otonomi sekolah, maka keterlibatan para ahli pendidikan dan kurikulum sangat diperlukan, sebab apa yang telah digariskan pada tingkat pusat belum tentu dapat dengan mudah dipahami oleh para pengembang dan pelaksana kurikulum di daerah. Pengembangan kurikulum juga membutuhkan keterlibatan para ahli bidang studi/disiplin ilmu yang memiliki wawasan tentang pendidikan dan perkembangan tuntutan masyarakat. Sumbangan mereka dalam memilih materi bidang ilmu yang mutakhir dan sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat sangat diperlukan. Mereka juga sangat diharapkan keterlibatannya dalam menyusun materi ajar dalam sekuens yang sesuai dengan struktur keilmuan tetapi sangat memudahkan para siswa untuk mempelajarinya.

Kunci keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan kurikulum pada hakekatnya ada di tangan para guru. Sekalipun tidak semua guru dilibatkan dalam pengembangan pada tingkat pusat/nasional, namun dia adalah perencana, pelaksana dan pengembang kurikulum bagi kelasnya. Sekalipun para guru tidak mencetuskan sendiri konsep-konsep tentang kurikulum, guru yang menerjemahkan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang dikembangkan oleh BSNP, dia yang mengolah dan meramu kembali untuk disajikan di dalam kelas. Guru berada di garis depan dalam implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan, oleh karena itu guru pulalah yang selalu melakukan evaluasi dan penyempurnaan kurikulum. Hasil-hasil penilaian guru akan sangat membantu dalam menentukan hambatan-hambatan dalam implementasi kurikulum. Sebagai pelaksana kurikulum, guru harus mampu menciptakan kegiatan belajar-mengajar yang memungkinkan para siswa dapat menyerap isi kurikulum dengan sempurna. Guru tidak hanya berperan sebagai pengajar di kelas yang bertugas menyampaikan ilmu pengetahuan (bahan pelajaran) kepada siswa, dengan lebih banyak menggunakan metode penuturan/ceramah. Peranan guru seperti ini dalam kondisi sekarang nampaknya sudah tidak relevan lagi dengan tuntutan kurikulum, oleh karena itu perlu dikurangi frekuensinya. Sesuai dengan perkembangan jaman dan perkembangan ilmu pendidikan serta ditambah lagi dengan adanya kebijakan otonomi pendidikan dan otonomi sekolah, maka akan semakin banyak peranan dan keterlibatan guru dalam mengimplementasikan kurikulum yang memungkinkan terjadinya proses belajar pada diri siswa.

Sekolah atau satuan pendidikan adalah lembaga masyarakat yang mempersiapkan siswa agar mampu hidup di dalam masyarakat itu. Sebagai bagian dari masyarakat, sekolah sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat di mana sekolah itu berada. Isi kurikulum hendaknya mencerminkan kondisi dan dapat memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat sekitarnya. Untuk mencapai hal tersebut, sangat diperlukan keterlibatan pihak masyarakat dalam menentukan arah

pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Keterlibatan masyarakat dalam hal ini bisa saja berwujud pemberian bantuan dalam pelaksanaan kurikulum atau memberikan saran-saran, usul, pendapat mengenai keperluan-keperluan yang paling mendesak untuk dipertimbangkan dalam pengembangan kurikulum sekolah, sehingga siswa dapat mengatasi masalah-masalah di masyarakat di mana mereka hidup. Orang tua siswa, sebagai bagian tak terpisahkan dari masyarakat, diharapkan sangat berperan atau terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pengembangan kurikulum. Keterlibatan orangtua bisa dalam kegiatan penyusunan kurikulum dan pelaksanaan kurikulum. Dalam penyusunan kurikulum mungkin tidak semua orangtua dapat ikut serta, hanya terbatas kepada beberapa orangtua yang memiliki cukup waktu dan mempunyai latar belakang yang memadai. Keterlibatan orangtua lebih besar dalam kegiatan pelaksanaan kurikulum. Dalam hal ini diperlukan adanya kerja sama yang saling menguntungkan antara guru, sekolah dan para orangtua. Sebagian besar waktu belajar siswa yang dituntut kurikulum ada di luar sekolah, di antaranya dilaksanakan di rumah, dengan demikian sewajarnya apabila orangtua turut mengikuti dan mengamati kegiatan belajar anaknya di rumah.

I. Komponen Isi Kurikulum

Kurikulum merupakan bagian yang sangat esensial dalam keseluruhan kegiatan pendidikan di suatu sekolah. Dalam pengembangan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan akan menyangkut banyak faktor, mempertimbangkan isu-isu mengenai kurikulum, siapa yang dilibatkan, bagaimana prosesnya, apa tujuannya, dan kepada siapa kurikulum itu ditujukan. Pada umumnya para ahli kurikulum memandang bahwa pengembangan kurikulum itu merupakan suatu proses yang berkelanjutan dan merupakan suatu siklus dari beberapa komponen. Ralph W. Tyler (1975) dalam buku kecilnya yang sangat terkenal dan konsep-konsepnya masih dipakai sampai sekarang, menyajikan empat langkah pengembangan (*Four-Step Model*) dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang mendasar yang harus dijawab dalam mengembangkan suatu kurikulum, yaitu :

- a. *What educational purposes should the school seek to attain?*
- b. *What educational experiences can be provided that are likely to attain these purposes ?*
- c. *How can these educational experiences be effectively organized ?*
- d. *How can we determine whether these purposes are being attained ?*

Pertanyaan pertama pada hakekatnya merupakan arah dari suatu program atau tujuan kurikulum, pertanyaan kedua berkenaan dengan isi/konten yang harus diberikan untuk mencapai tujuan, pertanyaan ketiga berkenaan dengan strategi pelaksanaan, dan pertanyaan keempat berkenaan dengan penilaian (evaluasi) pencapaian tujuan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi komponen utama yang harus dipenuhi dalam suatu kegiatan pengembangan kurikulum di sekolah. Komponen-komponen itu tidaklah berdiri sendiri, tetapi saling pengaruh mempengaruhi, berinteraksi, berinterelasi satu sama lain dan membentuk suatu sistem (*system*).

Dalam kaitannya dengan komponen isi kurikulum tingkat satuan pendidikan, dalam panduan penyusunan telah ditetapkan sistematikanya, yaitu mencakup: (1) Tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, (2) Struktur dan muatan kurikulum, dan (3) Kalender pendidikan.

Komponen tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan dirumuskan dengan mengacu kepada tujuan umum pendidikan, yaitu meletakkan dasar dan meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Dalam kegiatan pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan ini peran tujuan sangatlah menentukan. Ivor K. Davies (dalam Hamid Hasan, 1990) menyatakan bahwa tujuan dalam suatu kurikulum akan menggambarkan kualitas manusia yang diharapkan terbina dari suatu proses pendidikan. Dengan demikian suatu tujuan memberikan petunjuk mengenai arah perubahan yang dicita-citakan dari suatu kurikulum yang sifatnya harus merupakan sesuatu yang final. Tujuan memberikan pegangan apa yang harus dilakukan, bagaimana cara melakukannya, dan merupakan patokan untuk mengetahui hingga mana tujuan itu telah dicapai (S. Nasution, 1987). Tujuan sangat memegang peranan penting, akan mewarnai keseluruhan komponen-komponen lainnya dan akan mengarahkan semua kegiatan mengajar (Nana Syaodih, 1988). Tujuan kurikulum yang dirumuskan menggambarkan pula pandangan para pengembang kurikulum mengenai pengetahuan, kemampuan, serta sikap yang ingin dikembangkan (Hamid Hasan, 1990). Tujuan yang jelas akan memberi petunjuk yang jelas pula terhadap pemilihan isi/konten, strategi dan media pembelajaran, dan evaluasi, bahkan dalam berbagai model pengembangan kurikulum, tujuan ini dianggap sebagai dasar, arah, patokan dalam menentukan komponen-komponen yang lainnya.

Komponen struktur dan muatan kurikulum memuat penjelasan-penjelasan yang rinci berkaitan dengan mata pelajaran, muatan lokal, kegiatan pengembangan diri, pengaturan beban belajar, ketuntasan belajar, kenaikan kelas dan kelulusan, penjurusan, pendidikan kecakapan hidup, pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global (penjelasan secara rinci mengenai komponen ini dapat dilihat dalam buku panduan penyusunan KTSP yang diterbitkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan). Sedangkan komponen terakhir yaitu kalender pendidikan yang disusun oleh masing-masing satuan pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan daerah, karakteristik sekolah, kebutuhan peserta didik dan masyarakat, dengan memperhatikan kalender pendidikan sebagaimana yang dimuat dalam Standar Isi.

Sebagai salah satu bentuk alternatif yang dapat ditempuh oleh pihak pengelola sekolah dalam penyusunan KTSP ini bisa dengan menggunakan sistematika yang memuat bagian-bagian sebagai berikut:

- a. Pendahuluan, diantaranya meliputi uraian mengenai latar belakang atau rasional penyusunan kurikulum sekolah; visi, misi, dan tujuan sekolah; dan standar kompetensi lulusan sesuai dengan jenjang satuan pendidikan yang bersangkutan.
- b. Keadaan dan potensi sekolah, diantaranya meliputi uraian mengenai keadaan dan lingkungan sekolah; struktur organisasi dan personil sekolah; keadaan siswa; dan program kemitraan/kerjasama yang digagas sekolah dengan lembaga/pihak lain.
- c. Struktur dan muatan kurikulum, diantaranya meliputi uraian mengenai struktur kurikulum sekolah dan muatan kurikulum yang terdiri atas mata pelajaran, muatan lokal, kegiatan pengembangan diri, pendidikan kecakapan hidup, beban belajar, ketuntasan belajar, penjurusan, kenaikan kelas, dan kelulusan.
- d. Kalender pendidikan, diantaranya meliputi uraian mengenai permulaan tahun pelajaran, waktu belajar, kegiatan tengah semester, libur sekolah, jadwal kegiatan, dsb.
- e. Lampiran-lampiran, berupa silabus pada masing-masing mata pelajaran dan beberapa contoh rancana pelaksanaan pembelajaran (RPP).

DAFTAR PUSTAKA

- Asep Herry Hernawan. (2006). Pengembangan Silabus dan Satuan Pembelajaran. Makalah Pelatihan Pengembangan Kurikulum bagi Guru. Bandung.
- Djaali. (2006). Standar Nasional Pendidikan. Makalah Semiloka Nasional Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Berbudaya. Jakarta.
- Doll, Ronald C., Curriculum Improvement Decision Making and Process, Third Edition, Allyn and Bacon, Inc., Boston-London-Sidney, 1974.
- Nana Sudjana, Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum di Sekolah, Sinar Baru, Bandung, 1989.
- Nana Syaodih Sukmadinata, Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2001.
- Oemar Hamalik, Pengembangan Kurikulum, Dasar-dasar dan Pengembangannya, Mandar Maju, Bandung, 1990.
- Ornstein, Allan c. and Francis P. Hunkins, Curriculum, Foundations, Principles, and Issues, Allyn and Bacon, Boston, 1988.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Pemerintah Nomor 22, 23, 24 Tahun 2006
- S. Hamid Hasan, Evaluasi Kurikulum, P2LPTK, Jakarta, 1988.
- Tyler, Ralph W., Basic Principles of Curriculum and Instruction, The University of Chicago Press, Chicago and London, 1975.
- Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Zais, Robert S., Curriculum, Principles and Foundations, Haeper and Row Publisher, NY, 1976.